



**KOMISI PEMILIHAN UMUM
REPUBLIK INDONESIA**

Jakarta, 12 Juni 2020

Nomor : 441/PL.02-SD/01/KPU/VI/2020
Sifat : Sangat Segera
Lampiran : 1 (satu) Berkas
Perihal : Pengaktifan Kembali Panitia
Pemilihan Kecamatan (PPK) dan
Panitia Pemungutan Suara (PPS)
pada Pemilihan Tahun 2020

Yth. 1. Ketua KPU Provinsi
2. Ketua KPU Kabupaten/Kota
(yang menyelenggarakan Pemilihan
Serentak Tahun 2020 sebagaimana
terlampir)
di -
Tempat

Sehubungan dengan telah diterbitkannya Peraturan Komisi Pemilihan Nomor 5 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 15 Tahun 2019 Tentang Tahapan, Program dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Wali Kota dan Wakil Wali Kota Tahun 2020, bersama ini diinstruksikan hal-hal sebagai berikut:

1. KPU Kabupaten/Kota membuat Surat Keputusan KPU Kabupaten/Kota untuk mengaktifkan kembali anggota PPK dan PPS serta sekretariat PPK dan sekretariat PPS dengan melakukan perubahan atas Surat Keputusan KPU Kabupaten/Kota tentang penundaan masa kerja anggota PPK dan PPS serta sekretariat PPK dan sekretariat PPS untuk Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati dan/atau Wali Kota dan Wakil Wali Kota Tahun 2020;
2. KPU Kabupaten/Kota menetapkan Keputusan KPU Kabupaten/Kota tentang pengaktifan Kembali anggota PPK dan PPS serta sekretariat PPK dan sekretariat PPS dengan berpedoman pada peraturan KPU yang mengatur mengenai tahapan, program, dan jadwal penyelenggaraan Pemilihan Tahun 2020;

3. KPU Kabupaten/Kota melanjutkan proses tahapan yang tertunda setelah menerbitkan Surat Keputusan KPU Kabupaten/Kota tentang pengaktifan kembali anggota PPK dan PPS serta sekretariat PPK dan sekretariat PPS;
4. Sebelum mengaktifkan kembali, KPU Kabupaten/Kota wajib memastikan anggota PPK dan PPS serta sekretariat PPK dan sekretariat PPS masih memenuhi syarat sesuai ketentuan yang berlaku;
5. Dalam hal terdapat anggota PPK dan PPS serta sekretariat PPK dan sekretariat PPS yang tidak memenuhi syarat dalam pengaktifan kembali, KPU Kabupaten/Kota melakukan pergantian antarwaktu anggota PPK dan PPS;
6. Mekanisme pergantian antarwaktu anggota PPK dan PPS adalah sebagai berikut:
 - a. KPU Kabupaten/Kota menetapkan calon anggota PPK atau PPS yang berada pada urutan berikutnya pada hasil tes wawancara untuk ditetapkan sebagai anggota PPK dan PPS pergantian antarwaktu;
 - b. Dalam hal tidak terdapat anggota PPK dan PPS urutan berikutnya dari hasil tes wawancara, KPU Kabupaten/Kota menetapkan calon anggota PPK atau PPS yang berada pada urutan berikutnya dari peringkat teratas hasil seleksi tertulis sesuai dengan jumlah yang dibutuhkan 5 (lima) orang untuk PPK, dan 3 (tiga) orang untuk PPS);
 - c. Dalam hal jumlah kebutuhan tidak terpenuhi dengan mekanisme sebagaimana dimaksud dalam huruf b, KPU Kabupaten/Kota bekerja sama dengan perguruan tinggi, lembaga pendidikan atau lembaga profesi untuk memenuhi jumlah kebutuhan anggota PPK dan/atau PPS;
 - d. Dalam hal jumlah kebutuhan tidak terpenuhi dengan mekanisme sebagaimana dimaksud dalam poin c, KPU Kabupaten/Kota menunjuk personil yang memenuhi syarat setelah berkoordinasi dengan perangkat kecamatan/kelurahan/desa;
 - e. Dalam hal tahapan sudah berjalan, namun jumlah yang dibutuhkan 5 (lima) orang untuk PPK, dan 3 (tiga) orang untuk PPS belum terpenuhi, maka tahapan tetap berjalan dengan jumlah PPK dan PPS tetap memenuhi ketentuan kuorum di setiap tingkatannya;
 - f. Dalam hal jumlah anggota PPK dan/atau PPS sebagaimana dimaksud pada huruf e tidak terpenuhi, maka pelaksanaan tugas dan fungsi PPK dan/atau PPS diambil alih oleh satu tingkat di atasnya.

7. Mekanisme pelantikan anggota PPK dan PPS yang belum dilantik dan pelantikan anggota PPK dan PPS pergantian antarwaktu adalah sebagai berikut:
 - a. KPU Kabupaten/Kota melaksanakan pelantikan anggota PPK dan PPS paling lambat pada tanggal 15 Juni 2020;
 - b. Pelantikan anggota PPK dan PPS dapat dilaksanakan secara daring (*online*) atau secara tata muka (*offline*) sesuai dengan ketentuan dan protokol kesehatan yang berlaku;
 - c. Dalam hal pelantikan anggota PPK dan PPS dilakukan secara tatap muka (*offline*), maka pelantikan dilakukan di masing-masing kecamatan dengan mekanisme 5 (lima) orang Ketua/Anggota KPU Kabupaten/Kota diberikan kewenangan masing-masing untuk melantik di kecamatan (berpencar di 5 (lima) titik yang berbeda);
 - d. Pelantikan calon anggota PPK dan PPS dan bimbingan teknis (bimtek) PPS dilaksanakan secara bergelombang dengan waktu menyesuaikan kesiapan personil KPU Kabupaten/Kota dan anggota PPS dengan masa kerja dimulai pada tanggal 15 Juni 2020;
 - e. Dalam hal KPU Kabupaten/Kota tidak dapat melaksanakan pelantikan sebagaimana mekanisme yang diatur dalam huruf c, maka KPU Kabupaten/Kota dapat melimpahkan wewenang pelaksanaan pelantikan dan bimtek PPS kepada Ketua PPK;
 - f. Dalam hal KPU Kabupaten/Kota tidak dapat melaksanakan pelantikan anggota PPK dan PPS sebagaimana mekanisme yang diatur dalam huruf b, maka KPU Kabupaten/Kota menyerahkan Salinan Surat Keputusan Pengangkatan anggota PPK kepada masing-masing anggota PPK terpilih dan anggota PPS kepada masing-masing anggota PPS terpilih melalui anggota PPK dan dapat dilakukan secara elektronik melalui media komunikasi yang tersedia dalam bentuk *softfile*;
 - g. Anggota PPK dan PPS yang sudah menerima Salinan Surat Keputusan Pengangkatan wajib menandatangani Pakta Integritas dan menyampaikannya kepada KPU Kabupaten/Kota untuk anggota PPK serta melalui PPK untuk anggota PPS dan dapat dilakukan secara elektronik melalui media komunikasi yang tersedia dalam bentuk *softfile*.

8. Dalam Proses Pelantikan Anggota PPK dan PPS wajib mengikuti Protokol Covid-19 sebagaimana telah disampaikan dalam Surat Dinas Nomor 259/PP.04.2-SD/01/KPU/III/2020 perihal Penegasan Mekanisme Kerja Teknis Pelaksanaan Tahapan Pemilihan 2020 tanggal 19 Maret 2020. Anggota PPK, PPS, sekretariat PPK dan sekretariat PPS, PPDP dan KPPS yang telah ditetapkan wajib mengisi Surat Pernyataan Sehat khusus terkait Covid-19 sebagaimana terlampir;

9. KPU Provinsi agar melakukan supervisi dan monitoring terhadap proses pengaktifan kembali anggota PPK dan PPS serta sekretariat PPK dan sekretariat PPS dan melaporkan kepada KPU melalui email litbang.organisasi@kpu.go.id paling lambat tanggal 30 Juni 2020

Demikian untuk dilaksanakan, terima kasih.

**Ketua Komisi Pemilihan Umum
Republik Indonesia,**



Tembusan disampaikan kepada Yth:

1. Menteri Dalam Negeri;
2. Ketua Badan Pengawas Pemilihan Umum RI;
3. Ketua Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilihan Umum RI.

Lampiran Surat

Nomor : 441/PL.02-SD/01/KPU/VI/2020

Tanggal : 12 Juni 2020

No	NAMA SATKER
1	KPU Provinsi Sumatera Utara
2	KPU Provinsi Sumatera Barat
3	KPU Provinsi Riau
4	KPU Provinsi Sumatera Selatan
5	KPU Provinsi Lampung
6	KPU Provinsi Kep. Babel
7	KPU Provinsi Kepri
8	KPU Provinsi Jawa Barat
9	KPU Provinsi Jawa Tengah
10	KPU Provinsi Jawa Timur
11	KPU Provinsi Banten
12	KPU Provinsi Bali
13	KPU Provinsi NTB
14	KPU Provinsi NTT
15	KPU Provinsi Kalimantan Barat
16	KPU Provinsi Kalimantan Tengah
17	KPU Provinsi Kalimantan Selatan
18	KPU Provinsi Kalimantan Timur
19	KPU Provinsi Sulawesi Tenggara
20	KPU Provinsi Sulawesi Tengah
21	KPU Provinsi Sulawesi Selatan
22	KPU Provinsi Sulawesi Utara
23	KPU Provinsi Gorontalo
24	KPU Provinsi Sulawesi Barat
25	KPU Provinsi Maluku
26	KPU Provinsi Maluku Utara
27	KPU D.I Yogyakarta
28	KPU Provinsi Bengkulu
29	KPU Provinsi Jambi
30	KPU Provinsi Papua Barat
31	KPU Provinsi Papua
32	KPU Provinsi Kalimantan Utara
261 PEMILIHAN BUPATI/WAKIL BUPATI-WALIKOTA/WAKIL WALIKOTA	
JAWA BARAT (8 Kabupaten/kota)	
1	KPU Kab. Sukabumi
2	KPU Kab. Cianjur
3	KPU Kab. Karawang
4	KPU Kab. Bandung
5	KPU Kab. Tasikmalaya
6	KPU Kab. Indramayu

No	NAMA SATKER
7	KPU Kota Depok
8	KPU Kab. Pangandaran
JAWA TENGAH (21 Kabupaten/Kota)	
9	KPU Kab. Semarang
10	KPU Kab. Kendal
11	KPU Kab. Demak
12	KPU Kab. Grobogan
13	KPU Kab. Pekalongan
14	KPU Kab. Pemalang
15	KPU Kab. Rembang
16	KPU Kab. Blorarr
17	KPU Kab. Purbalingga
18	KPU Kab. Wonosobo
19	KPU Kab. Purworejo
20	KPU Kab. Kebumen
21	KPU Kab. Klaten
22	KPU Kab. Boyolali
23	KPU Kab. Sragen
24	KPU Kab. Sukoharjo
25	KPU Kab. Wonogiri
26	KPU Kota Semarang
27	KPU Kota Pekalongan
28	KPU Kota Magelang
29	KPU Kota Surakarta
DI YOGYAKARTA (3 Kabupaten/Kota)	
30	KPU Kab. Bantul
31	KPU Kab. Gunungkidul
32	KPU Kab. Sleman
JAWA TIMUR (19 Kabupaten/Kota)	
33	KPU Kab. Banyuwangi
34	KPU Kab. Blitar
35	KPU Kab. Gresik
36	KPU Kab. Jember
37	KPU Kab. Kediri
38	KPU Kab. Lamongan
39	KPU Kab. Malang
40	KPU Kab. Mojokerto
41	KPU Kab. Ngawi
42	KPU Kab. Pacitan
43	KPU Kab. Ponorogo
44	KPU Kab. Sidoarjo
45	KPU Kab. Situbondo
46	KPU Kab. Sumenep
47	KPU Kab. Trenggalek
48	KPU Kab. Tuban

No	NAMA SATKER
49	KPU Kota Surabaya
50	KPU Kota Blitar
51	KPU Kota Pasuruan
SUMATERA UTARA (23 Kabupaten/Kota)	
52	KPU Kab. Tapanuli Selatan
53	KPU Kab. Nias
54	KPU Kab. Tanah Karo
55	KPU Kab. Serdang Bedagai
56	KPU Kab. Simalungun
57	KPU Kab. Asahan
58	KPU Kab. Labuhan Batu
59	KPU Kab. Toba Samosir
60	KPU Kab. Samosir
61	KPU Kab. Mandailing Natal
62	KPU Kab. Nias Selatan
63	KPU Kab. Pakpak Bharat
64	KPU Kab. Humbang Hasundutan
65	KPU Kota Medan
66	KPU Kota Pematang Siantar
67	KPU Kota Sibolga
68	KPU Kota Tanjung Balai
69	KPU Kota Binjai
70	KPU Kab. Labuhan Batu Selatan
71	KPU Kab. Labuhan Batu Utara
72	KPU Kab. Nias Utara
73	KPU Kab. Nias Barat
74	KPU Kota Gunung Sitoli
SUMATERA BARAT (13 Kabupaten/Kota) + Pemilihan Gubernur	
75	KPU Kab. Pesisir Selatan
76	KPU Kab. Solok
77	KPU Kab. Solok Selatan
78	KPU Kab. Sawahlunto Sijunjung
79	KPU Kab. Dharmas Raya
80	KPU Kab. Tanah Datar
81	KPU Kab. Padang Pariaman
82	KPU Kab. Agam
83	KPU Kab. Lima Puluh Kota
84	KPU Kab. Pasaman
85	KPU Kab. Pasaman Barat
86	KPU Kota Solok
87	KPU Kota Bukittinggi
RIAU (9 Kabupaten/Kota)	
88	KPU Kab. Kuantan Singingi
89	KPU Kab. Indragiri Hulu
90	KPU Kab. Pelalawan

No	NAMA SATKER
91	KPU Kab. Siak
92	KPU Kab. Rokan Hulu
93	KPU Kab. Bengkalis
94	KPU Kab. Rokan Hilir
95	KPU Kota Dumai
96	KPU Kab. Kepulauan Meranti
JAMBI (5 Kabupaten/Kota) + Pemilihan Gubernur	
97	KPU Kab. Batanghari
98	KPU Kab. Tanjung Jabung Timur
99	KPU Kab. Tanjung Jabung Barat
100	KPU Kab. Bungo
101	KPU Kota Sungai Penuh
SUMATERA SELATAN (7 Kabupaten/Kota)	
102	KPU Kab. Musi Rawas
103	KPU Kab. Ogan Ilir
104	KPU Kab. Ogan Komering Ulu
105	KPU Kab. Ogan Komering Ulu Timur
106	KPU Kab. Ogan Komering Ulu Selatan
107	KPU Kab. Penukal Abab Lematang Ilir
108	KPU Kab. Musi Rawas Utara
LAMPUNG (8 Kabupaten/Kota)	
109	KPU Kab. Lampung Tengah
110	KPU Kab. Lampung Timur
111	KPU Kab. Way Kanan
112	KPU Kab. Lampung Selatan
113	KPU Kota Metro
114	KPU Kota Bandar Lampung
115	KPU Kab. Pesawaran
116	KPU Kab. Pesisir Barat
KALIMANTAN BARAT (7 Kabupaten/Kota)	
117	KPU Kab. Sambas
118	KPU Kab. Bengkayang
119	KPU Kab. Sekadau
120	KPU Kab. Ketapang
121	KPU Kab. Sintang
122	KPU Kab. Melawi
123	KPU Kab. Kapuas Hulu
KALIMANTAN TENGAH (1 Kabupaten/Kota) + Pemilihan Gubernur	
124	KPU Kab. Kotawaringin Timur
KALIMANTAN SELATAN (7 Kabupaten/Kota) + Pemilihan Gubernur	
125	KPU Kab. Balangan
126	KPU Kab. Tanah Bumbu
127	KPU Kab. Hulu Sungai Tengah
128	KPU Kab. Banjar
129	KPU Kab. Kotabaru

No	NAMA SATKER
130	KPU Kota Banjar Baru
131	KPU Kota Banjarmasin
KALIMANTAN TIMUR (9 Kabupaten/Kota)	
132	KPU Kab. Kutai Timur
133	KPU Kab. Kutai Barat
134	KPU Kab. Berau
135	KPU Kab. Kutai Kartanegara
136	KPU Kab. Pasir
137	KPU Kota Bontang
138	KPU Kota Samarinda
139	KPU Kota Balikpapan
140	KPU Kab. Mahakam Ulu
SULAWESI UTARA (7 Kabupaten/Kota) + Pemilihan Gubernur	
141	KPU Kab. Minahasa Selatan
142	KPU Kab. Minahasa Utara
143	KPU Kota Manado
144	KPU Kota Bitung
145	KPU Kota Tomohon
146	KPU Kab. Bolaang Mongondow Selatan
147	KPU Kab. Bolaang Mongondow Timur
SULAWESI TENGAH (8 Kabupaten/Kota) + Pemilihan Gubernur	
148	KPU Kab. Banggai
149	KPU Kab. Poso
150	KPU Kab. Toli-Toli
151	KPU Kab. Tojo Una-Una
152	KPU Kota Palu
153	KPU Kab. Sigi
154	KPU Kab. Banggai Laut
155	KPU Kab. Morowali Utara
SULAWESI SELATAN (11 Kabupaten/Kota)	
156	KPU Kab. Selayar
157	KPU Kab. Bulukumba
158	KPU Kab. Gowa
159	KPU Kab. Maros
160	KPU Kab. Pangkajene Kepulauan
161	KPU Kab. Barru
162	KPU Kab. Soppeng
163	KPU Kab. Tanatoraja
164	KPU Kab. Luwu Utara
165	KPU Kab. Luwu Timur
166	KPU Kab. Toraja Utara
SULAWESI TENGGARA (7 Kabupaten/Kota)	
167	KPU Kab. Kolaka Timur
168	KPU Kab. Muna
169	KPU Kab. Konawe Selatan

No	NAMA SATKER
170	KPU Kab. Wakatobi
171	KPU Kab. Konawe Utara
172	KPU Kab. Buton Utara
173	KPU Kab. Konawe Kepulauan
MALUKU (4 Kabupaten/Kota)	
174	KPU Kab. Seram Bagian Timur
175	KPU Kab. Kepulauan Aru
176	KPU Kab. Buru Selatan
177	KPU Kab. Maluku Barat Daya
BALI (6 Kabupaten/Kota)	
178	KPU Kab. Jembrana
179	KPU Kab. Karangasem
180	KPU Kab. Bangli
181	KPU Kab. Badung
182	KPU Kab. Tabanan
183	KPU Kota Denpasar
NUSA TENGGARA BARAT (7 Kabupaten/Kota)	
184	KPU Kab. Lombok Tengah
185	KPU Kab. Bima
186	KPU Kab. Sumbawa
187	KPU Kab. Dompu
188	KPU Kab. Sumbawa Barat
189	KPU Kota Mataram
190	KPU Kab. Lombok Utara
NUSA TENGGARA TIMUR (9 Kabupaten/Kota)	
191	KPU Kab. Belu
192	KPU Kab. Timor Tengah Utara
193	KPU Kab. Ngada
194	KPU Kab. Manggarai
195	KPU Kab. Sumba Timur
196	KPU Kab. Sumba Barat
197	KPU Kab. Manggarai Barat
198	KPU Kab. Sabu Raijua
199	KPU Kab. Malaka
PAPUA (11 Kabupaten/Kota)	
200	KPU Kab. Merauke
201	KPU Kab. Nabire
202	KPU Kab. Kerom
203	KPU Kab. Pegunungan Bintang
204	KPU Kab. Yahukimo
205	KPU Kab. Waropen
206	KPU Kab. Boven Digul
207	KPU Kab. Asmat
208	KPU Kab. Supiori
209	KPU Kab. Mamberamo

No	NAMA SATKER
210	KPU Kab. Yalimo
BENGKULU (8 Kabupaten/Kota) + Pemilihan Gubernur	
211	KPU Kab. Bengkulu Selatan
212	KPU Kab. Kapahiyang
213	KPU Kab. Rejang Lebong
214	KPU Kab. Lebong
215	KPU Kab. Bengkulu Utara
216	KPU Kab. Kaur
217	KPU Kab. Seluma
218	KPU Kab. Muko-Muko
MALUKU UTARA (8 Kabupaten/Kota)	
219	KPU Kab. Halmahera Barat
220	KPU Kab. Halmahera Utara
221	KPU Kab. Halmahera Selatan
222	KPU Kab. Halmahera Timur
223	KPU Kab. Kepulauan Sula
224	KPU Kota Ternate
225	KPU Kota Tidore Kepulauan
226	KPU Kab. Pulau Taliabu
BANTEN (4 Kabupaten/Kota)	
227	KPU Kab. Serang
228	KPU Kab. Pandeglang
229	KPU Kota Cilegon
230	KPU Kota Tangerang Selatan
BANGKA BELITUNG (4 Kabupaten/Kota)	
231	KPU Kab. Belitung Timur
232	KPU Kab. Bangka Barat
233	KPU Kab. Bangka Tengah
234	KPU Kab. Bangka Selatan
GORONTALO (3 Kabupaten/Kota)	
235	KPU Kab. Gorontalo
236	KPU Kab. Bone Bolango
237	KPU Kab. Pohuwato
KEPULAUAN RIAU (6 Kabupaten/Kota) + Pemilihan Gubernur	
238	KPU Kab. Bintan
239	KPU Kab. Lingga
240	KPU Kab. Karimun
241	KPU Kab. Natuna
242	KPU Kota Batam
243	KPU Kab. Kep. Anambas
PAPUA BARAT (9 Kabupaten/Kota)	
244	KPU Kab. Fak-Fak
245	KPU Kab. Manokwari
246	KPU Kab. Sorong Selatan
247	KPU Kab. Raja Ampat

No	NAMA SATKER
248	KPU Kab. Kaimana
249	KPU Kab. Teluk Bintuni
250	KPU Kab. Teluk Wondama
251	KPU Kab. Pegunungan Arfak
252	KPU Kab. Manokwari Selatan
SULAWESI BARAT (4 Kabupaten/Kota)	
253	KPU Kab. Majene
254	KPU Kab. Mamuju
255	KPU Kab. Pasang Kayu
256	KPU Kab. Mamuju Tengah
KALIMANTAN UTARA (4 Kabupaten/Kota) + Pemilihan Gubernur	
257	KPU Kab. Malinau
258	KPU Kab. Nunukan
259	KPU Kab. Bulungan
260	KPU Kab. Tana Tindung
SULAWESI SELATAN (1 Kota)	
261	KPU Kota Makassar

Lampiran Surat

Nomor

: 441/PL.02-SD/01/KPU/VI/2020

Tanggal

: 12 Juni 2020

SURAT PERNYATAAN SEHAT KHUSUS COVID 19
ANGGOTA PANITIA PEMILIHAN KECAMATAN, PANITIA
PEMUNGUTAN SUARA, KELOMPOK PENYELENGGARA PEMUNGUTAN
SUARA DAN PETUGAS PEMUTAKHIRAN DATA PEMILIH PADA
PEMILIHAN TAHUN 2020

Yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama :

NIK :

Jenis Kelamin :

Tempat Tgl.Lahir/Usia :/.....tahun

Pekerjaan :

Jabatan di Badan Adhoc:

Alamat :

Riwayat Kesehatan

Beri tanda \surd di depan "Ya" atau "Tidak"				
Mempunyai penyakit Komorbid/Penyerta Covid 19 seperti diabetes, hipertensi, asma, jantung, kanker dll	Ya		Tidak	Keterangan:
Pernah dirawat di rumah sakit karena penyakit diabetes, hipertensi, asma, jantung, kanker dll dalam satu tahun terakhir (Juni 2019 – Mei 2020)	Ya		Tidak	Keterangan:
Mengonsumsi obat-obatan secara rutin untuk penyakit diabetes, hipertensi, asma, jantung, kanker dll	Ya		Tidak	Keterangan:

Riwayat yang berkaitan dengan COVID-19 :

Dalam 2 (dua) minggu terakhir:					Tanggal	Keterangan
Beri tanda \surd di depan "Ya" atau "Tidak"						
a. Pernah kontak dengan pasien COVID-19	Ya		Tidak			
b. Pernah bepergian ke daerah/negara terpapar COVID-19	Ya		Tidak			
c. Pernah bepergian ke Rumah Sakit	Ya		Tidak			
d. Pernah menjalani Rapidtest	Ya		Tidak			
e. Pernah menjalani Tes Swab	Ya		Tidak			
f. Berstatus ODP	Ya		Tidak			
g. Berstatus PDP	Ya		Tidak			
h. Pernah dirawat (Positif)	Ya		Tidak			

Demikian surat pernyataan ini dibuat dengan sebenarnya sebagai Anggota PPK/PPS/ KPPS/PPDP KPU Kabupaten/Kota..... Kecamatan..... Kelurahan/Desa

Saya bersedia menerima sanksi sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan apabila dikemudian hari terbukti memalsukan kebenaran pernyataan Riwayat yang berkaitan dengan Kesehatan dan COVID-19.

Demikian pernyataan ini dibuat untuk dipergunakan sebagaimana mestinya, terima kasih.

.....,

Yang membuat pernyataan,



.....